

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mengatur mengenai otonomi daerah telah merubah proses pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan daerah mendapatkan kuasa penuh dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus daerahnya melalui prakarsanya sendiri. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat merencanakan anggaran serta mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran tersebut pada setiap periodenya. Menurut Bastian dalam Sinaga (2011) organisasi sektor publik di Indonesia didefinisikan sebagai organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat melalui aktifitas pelayanan publik baik dalam memenuhi kebutuhan mendasar maupun kebutuhan lainnya harus lebih transparan dalam menyediakan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya.

Di Indonesia, mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah memang hanya sebatas menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit BPK kepada DPRD, namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggungjawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat maka transparansi keuangan merupakan hal yang perlu

dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mengungkapkan laporan keuangan secara sukarela di internet sehingga seluruh *stakeholder* memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ada di lingkungan pemerintah daerah (Afryansyah, 2013). Hal itu didukung dengan perkembangan teknologi internet di Indonesia seperti sekarang ini yang begitu pesat. Terbukti dari meningkatnya pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 2013 sudah mencapai 71,19 juta orang. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa penggunaan internet sebagai media informasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sosial seperti sekarang ini. Bukan saja karena biaya penggunaannya yang relatif murah tetapi juga kemudahan mengakses informasi dengan cepat yang menjadi alasan kuat kenapa masyarakat Indonesia banyak menggunakan internet.

Pada kenyataannya, sudah 7 tahun setelah keluarnya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik akan tetapi sampai saat ini masalah transparansi pengelolaan keuangan masih menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan oleh pemerintah daerah. Padahal dengan melihat pesatnya perkembangan penggunaan internet dikalangan masyarakat pada saat ini, menjadikan internet sebagai salah satu media penyampaian utama dalam

mengungkapkan laporan keuangan merupakan langkah yang tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Di Indonesia, hampir semua pemerintah daerah memiliki *website* resmi akan tetapi tingkat pengungkapan daerah satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Akibatnya, masih terjadi heterogenitas dimana pengungkapan laporan keuangan di internet diungkapkan secara bervariasi mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling lengkap. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan peneliti terhadap semua *website* resmi pemerintahan daerah di Indonesia seperti bawah ini:

TABEL 1.1.
Pengungkapan Laporan Keuangan Seluruh Provinsi di Indonesia yang Website Dapat diakses

Nama	Skore	Jumlah Pemda	Hasil	Hasil dalam persen
Neraca	14	30	0,466666667	47%
LRA	18	30	0,6	60%
LAK	15	30	0,5	50%
CALK	5	30	0,166666667	17%

Sumber : *Website* resmi pemerintah daerah

Tabel 1.1. menunjukkan hasil pengungkapan laporan keuangan yang terdapat dalam *website* pemerintah provinsi di Indonesia. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 30 provinsi yang *websitenya* dapat diakses oleh peneliti dan rata-rata baru sekitar 43,5% provinsi di Indonesia yang mengungkapkan laporan keuangan di *websitenya*. Laporan realisasi anggaran menjadi komponen yang paling sering diungkapkan yaitu sebesar 60%. Komponen terendah yang diungkapkan adalah catatan atas laporan keuangan hanya sebesar 17%, padahal CaLK merupakan suatu penjelasan naratif mengenai

rincian dari angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan dan merupakan hal yang penting untuk sampaikan.

TABEL 1.2.
Pengungkapan Laporan Keuangan Seluruh Kota di Indonesia yang Website Dapat diakses

Nama	Skore	Jumlah Pemda	Hasil	Hasil dalam Persen
Neraca	23	83	0,277108434	28%
LRA	32	83	0,385542169	39%
LAK	19	83	0,228915663	23%
CALK	8	83	0,096385542	10%

Sumber : *Website* resmi pemerintah daerah

Selanjutnya, tabel 1.2. ini merupakan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap seluruh *website* pemerintah kota di Indonesia. Hasilnya menunjukkan rata-rata baru sekitar 25% *website* pemerintah kota yang mengungkapkan laporan keuangannya disitus resminya. Sisanya sekitar 75% masih belum mengungkapkan laporan keuangannya. Laporan realisasi anggaran kembali menjadi komponen yang paling sering diungkapkan yaitu sebesar 39%. Catatan atas laporan keuangan menjadi komponen yang terendah diungkapkan yaitu sebesar 10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pemerintahan kota di Indonesia yang belum melakukan transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat.

TABEL 1.3.
Pengungkapan Laporan Keuangan Seluruh Kabupaten di Indonesia
yang *Website* Dapat diakses

Nama	Skore	Jumlah Pemda	Hasil	Hasil dalam Persen
Neraca	54	307	0,175895765	18%
LRA	88	307	0,286644951	29%
LAK	50	307	0,16286645	16%
CALK	21	307	0,068403909	7%

Sumber : *Website* resmi pemerintah daerah

Tabel 1.3. menunjukkan hasil pengamatan peneliti terhadap *website* pemerintah kabupaten di Indonesia yang dapat diakses. Jumlah *website* pemerintah kabupaten yang dapat diakses sebesar 307, dan rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten di Indonesia sekitar 17,5%, artinya masih ada sekitar 82,5% yang belum melakukan pengungkapan. Data tersebut menunjukkan laporan realisasi anggaran kembali menjadi komponen yang sering diungkapkan yaitu sebesar 29%, sedangkan catatan atas laporan keuangan menjadi komponen yang terendah diungkapkan yaitu sebesar 7%.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian ini, menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh setiap tipe pemerintahan daerah di Indonesia masih dibawah 50%. Hasil ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan semakin membuktikan belum transparannya proses pengelolaan keuangan yang ada di lingkungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu,

masalah pengungkapan laporan keuangan masih menjadi masalah yang harus segera dibenahi dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sektor swasta dimana dalam melaporkan kegiatan usahanya kepada *stakeholder*, sektor swasta menjadikan internet sebagai prioritas utama karena dilihat dari efisiensi dan efektifitas internet sangat menguntungkan. Terbukti bahwa masyarakat di Indonesia lebih sering mencari informasi pada sektor-sektor swasta dibandingkan dengan mencari informasi mengenai pemerintahan daerahnya. Hal itu sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh BPS, bahwa penggunaan internet dalam mencari informasi berita menjadi peringkat dua sebesar 78,49%, untuk pencarian informasi barang dan jasa berada di peringkat tiga sebesar 77,81%, sedangkan pencarian informasi lembaga pemerintahan menduduki peringkat empat sebesar 65,07%.

Berdasarkan data diatas, seharusnya pemerintah daerah harus lebih memaksimalkan peranan internet dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, supaya minat masyarakat untuk mencari informasi mengenai pemerintahan daerahnya juga meningkat. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi motivasi suatu pemerintah daerah dalam mengungkapkan laporan keuangan kepada masyarakat.

Penelitian yang menguji tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan di internet telah banyak dilakukan, namun pada umumnya penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan, tetapi

untuk sektor pemerintahan masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2011) yang meneliti tentang pelaporan keuangan secara sukarela oleh pemerintah daerah di internet menunjukkan hasil bahwa hanya *leverage* dan tipe pemerintahan yang berpengaruh signifikan negatif terhadap pelaporan keuangan secara sukarela di internet. Selain itu, untuk ketiga variabel yang lain seperti kompetisi politik, ukuran dan kekayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan secara sukarela oleh pemerintah daerah di internet. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Medina (2012) menunjukkan hasil ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian dan kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah, sedangkan pendapatan perkapita masyarakat dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap ketersediaan informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahman dkk. (2013) yang meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *leverage*, *local government wealth*, *political competition* terbukti berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan di internet, sedangkan *size* dan tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan

informasi keuangan di internet. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Afryansyah (2013) menunjukkan hasil bahwa hanya variabel *press visibility* yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet, sedangkan variabel ukuran, tingkat investasi, kekayaan daerah dan kompetisi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hudoyo dan Amir (2014), menunjukkan hasil bahwa variabel kekayaan daerah dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap pelaporan keuangan internet oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang masih terjadi ketidak konsistenan hasil dan dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan pola kombinasi variabel independen yang berbeda-beda dan ada beberapa variabel yang masih jarang diteliti yang menjadikan daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Karakteristik yang diuji dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, kekayaan daerah, pendapatan perkapita, *leverage*, dan tipe pemerintahan kabupaten. Data laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD tahun 2012 yang telah di audit BPK.

Variabel jumlah penduduk mengacu pada penelitian Medina (2012) yang hasilnya berpengaruh positif dan Afryansyah (2013) yang hasilnya tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui

website pemerintah daerah. Variabel kekayaan daerah mengacu pada penelitian Medina (2012) yang hasilnya berpengaruh positif dan penelitian Rahman dkk. (2013), Afryansyah (2013), Hudoyo dan Amir (2014) yang ketiganya menghasilkan bahwa kekayaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui *website* pemerintah daerah. Variabel pendapatan perkapita mengacu pada penelitian Hudoyo dan Amir (2014) yang hasilnya berpengaruh positif dan penelitian Medina (2012) yang hasilnya tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui *website* pemerintah daerah.

Variabel *leverage* mengacu pada penelitian Rahman dkk. (2013) yang hasilnya berpengaruh positif dan Sinaga (2011), Medina (2012) yang hasilnya berpengaruh negatif sedangkan penelitian Hudoyo dan Amir (2014) hasilnya tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui *website* pemerintah daerah. Variabel Tipe pemerintahan kabupaten mengacu pada penelitian Sinaga (2011) yang hasilnya berpengaruh negatif dan Rahman dkk. (2013) yang hasilnya tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui *website* pemerintah daerah. Berdasarkan hasil yang belum konsisten tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai analisis faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Jumlah penduduk di suatu wilayah akan berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan informasi yang dibutuhkan di daerah tersebut. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar akan cenderung memiliki tingkat

kesadaran yang tinggi akan penggunaan teknologi internet sebagai penunjang kebutuhan informasi. Oleh karena itu, penggunaan internet sebagai media penyampaian informasi keuangan oleh pemerintah daerah merupakan langkah yang tepat.

Kekayaan pemerintah daerah biasanya menunjukkan tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Semakin besar kekayaan suatu daerah, maka masyarakat akan semakin tertarik untuk menilai dan ikut mengawasi bagaimana kekayaan tersebut dikelola (Trisnawati dan Komarudin, 2014). Hal itu dikarenakan jumlah kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan dan kecurangan. Maka dari itu, masyarakat selaku *principal* akan merasa terdorong untuk ikut mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah daerahnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menuntut transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Tingkat pendapatan perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Kemampuan daya beli masyarakat di daerah tersebut juga semakin tinggi yang akan memicu penggunaan teknologi baru semakin cepat diterapkan. Penggunaan teknologi internet sebagai sarana untuk mencari informasi menjadi tidak terpisahkan. Kemudahan dan akses yang cepat menjadi alasan masyarakat menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya untuk mencari informasi mengenai pemerintah daerahnya. Melihat banyaknya masyarakat yang

menggunakan internet, seharusnya dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam menyampaikan laporan pengelolaan keuangannya.

Leverage ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai biaya operasional dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik. *Leverage* ini akan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Selain itu, *leverage* akan berdampak pada perilaku pemberi pinjaman atau kreditur untuk melakukan pengawasan mengenai pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, dari pihak pemerintah daerah secara sukarela akan melakukan pengungkapan laporan keuangan berbentuk *hard copy* atau dengan menggunakan media yang lainnya, seperti media internet.

Di Indonesia, tipe pemerintahan dibagi menjadi tiga yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Ketiga tipe pemerintahan tersebut memiliki komposisi penduduk yang berbeda-beda. Penduduk kabupaten ini biasanya memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan urbanisasi ke wilayah pemerintah kota atau provinsi. Hal ini mengakibatkan komposisi penduduk di wilayah kabupaten menjadi lebih homogen dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang lebih heterogen dari beberapa aspek. Salah satu aspek yang terlihat berbeda adalah dari aspek penerapan teknologi. Daerah tujuan urbanisasi yaitu pemerintah kota dan provinsi akan lebih maju dalam perkembangan teknologinya dan memungkinkan bahwa pelaporan keuangan di internet secara sukarela akan lebih banyak dipraktikkan di tipe pemerintahan tersebut. Berdasarkan

penjabaran latar belakang di atas, peneliti mengambil judul penelitian “**Analisis Faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis *Website* oleh Pemerintah Daerah di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia?
2. Apakah kekayaan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia?
3. Apakah pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia?
4. Apakah *leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia?
5. Apakah tipe pemerintahan kabupaten mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah :

1. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia.
2. Kekayaan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia.
3. Pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia.
4. *Leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia.
5. Tipe pemerintahan kabupaten mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi :

1. Pihak pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan perangkatnya.
Diharapkan dapat memacu pihak pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan melakukan pengungkapan laporan keuangan berbasis *website*.

2. Pemakai laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya masyarakat, dalam hal menilai akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerahnya.
3. Peneliti lain, dalam hal menjadi masukan, referensi kajian-kajian empiris, serta dapat memberikan pengetahuan dan wawasan, untuk penelitian lebih lanjut mengenai analisis faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia.